



VOX

SERI BUKU

52/01/2007

ISSN 0216 - 8804

Homini Sapiens et Propheticus

ben**CANA**

KAAN
RO

/01

DF

1.

- menggugat Tuhan
- antropologi kemiskinan dan apolotisme para rohaniwan
- jangan main-main dengan kelaminmu (sebuah gugatan terhadap perilaku seksual masyarakat modern)
- menggagas solidaritas dan tanggung jawab sebagai kata kunci
- perantauan dan kemiskinan, problem yang tak kunjung usai
- prinsip dasar etis dalam bencana

SERI BUKU VOX

Diterbitkan berdasarkan SK Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 1304/SK/DITJEN PPG/STT/1986 tanggal 12 Februari 1986. Dicitak pada Percetakan Arnoldus Ende Flores-NTT. Terbit empat (4) kali setahun, ISSN (international Standart Serial Number): 0216 - 8804

Diselenggrakan oleh
Para Mahasiswa Sekolah Tinggi
Filsafat Katolik Ledalero
Kampus Ledalero, Maumere, Flores, NTT

Ketua Pengarah : P. Dr. Philipus Tule, SVD
Moderator : P. Dr. Lukas Jua, SVD
Ketua Redaksi : Johan Wadu
Wakil Ketua Redaksi : Alex Sila
Sekretaris : Willy Gaut
Bendahara : Stef Dampur
Tim Redaksi : Yanto Nabon, Sil Ule, Ve Nahak,
Luis Aman, Vano Jaman, Altus Jebada, Charles Emanuel
Pemasaran : Yoakhim Leu, Sixtus Go'oro, Frans
Seda, Dami Lelo, Efraim More, Elpi Lau, Dedi Dhosa, Jhon
Loin, Yori Nango, Karno Kelen, Rian Labaona, Tomy Wele,
John Nane
Cover/Lay out : Johan Wadu

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero
Tlp/Fax (0382) 21892-21893
Maumere 86152, Flores - NTT

Alamat Rekening Bank :
BNU Cabang Maumere
Seminari Tinggi Ledalero/VOX/Publikasi
No. Rek. 290.000539546.901

DAFTAR ISI

KataPengantar	3
Daftar Isi	5
Suara dari Bukit	
Bencana, Kesadaran Diri dan Kanal Kebudayaan	
Johan Wadu	7
“Jangan Main-Main (Dengan Kelaminmu)”: Sebuah Gugatan Terhadap Prilaku Seksual Masyarakat Modern	
Kristianto Nabon	13
Prinsip Dasar Etis dalam Penanganan Bencana	
Silvester Ule	41
Menggagas Solidaritas dan Tanggung Jawab sebagai Kata Kunci	
Willy Gaut	59
Antropologi Kemiskinan dan Apolotisme Para Rohaniwan Kitab Suci dan Paradoks Kemiskinan	
Alex Sila	77
Puisi-Puisi Athel	
Athel Lewokeda	98
Perantauan Dan Kemiskinan, Problem yang tak Kunjung Usai	
Paul Haman	99
Menggugat Tuhan	
Carlos Sarianto	113

Terorisme Ekologi dan Etika Ekologi Baru, Membangun Kesadaran Ekologis Pasca Bencana Salvano Jaman	127
Tengah Baru Untuk Masyarakat Siaga Bencana Servinus Nahak	143
“To Have Dan To Be” (Problematika Amugne di Bumi Amungsa) Charles Emanuel	161
Puisi-Puisi Ephang Ephang D. Yogalupi	170

TENGAH BARU UNTUK MASYARAKAT SIAGA BENCANA (Analisis Sosio-Ekonomi terhadap Budaya Pesta Masyarakat Kabupaten Sikka)

■ Servinus Nahak

CATATAN AWAL

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi miskin di Indonesia. Persoalan klasik selama hampir 49 tahun sejak provinsi ini berdiri (24 Desember 1958) adalah kemiskinan. Akibat faktual dari realitas kemiskinan ini nampak dalam kasus busung lapar yang cenderung rutin dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Sikka, kasus marasmus sering terulang. Malah, tragedi Wolofeo di tahun 1978 yang menewaskan 100 orang lebih nyaris terjadi lagi di tahun 2006 lalu.

Persoalan kemiskinan di NTT atau di manapun tidak hanya dapat diasalkan pada satu atau dua faktor penyebab saja. Realitas kemiskinan selalu muncul secara kompleks dan menyangkut banyak aspek kehidupan. Untuk NTT, budaya pesta¹, misalnya, adalah salah satu di antaranya yang diklaim sebagai penyebab kemiskinan selain iklim, topografi, curah hujan dan faktor-faktor alamiah lainnya. Menurut banyak kalangan selain sudah membudaya, pesta di kalangan masyarakat NTT diklaim mengandung potensi “pemiskinan.”² Di Kabupaten Sikka, pesta di kalangan masyarakat akar rumput muncul sebagai satu fenomena sosial yang cukup meluas dan terbilang unik.

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi budaya berpesta masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat Sikka pada khususnya, sebuah upaya kecil mencari “tengah baru”, titik seimbang yang bisa membuat masyarakat tidak ringkih di hadapan bencana. Ini, atas asumsi bahwa dalam pesta berkecambah pemborosan yang justru semakin mempermiskin masyarakat. Pesta dapat menjadi salah satu faktor yang turut mengacaukan *oikonomia* (Yunani) yang aslinya berarti “aturan rumah tangga”. Dalam upaya mendalami tema ini guna menganalisis berbagai persoalan sekitar pesta penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*).

REALITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT NTT DAN SIKKA PADA KHUSUSNYA

Masyarakat Agraris

Kondisi iklim, topografi dan struktur tanah di NTT yang kering memunculkan ekosistem yang unik berupa ekosistem lahan kering (semi-arid). Kondisi ekosistem seperti ini yang menyebabkan propinsi NTT pada umumnya memiliki budaya nafkah agro-pastoral³ dengan sandaran utama pada pengolahan ladang (21,30%) dan ternak gembala (22,70%). Sisa 25,30% lahan yang belum diusahakan dan 12,60% hutan rakyat.⁴

Bila diperhatikan lebih dalam, pola sumber nafkah agro-pastoral merupakan salah satu cara menjamin ketersediaan pangan (*food security*) untuk menghadapi kondisi lingkungan fisik yang kurang bersahabat bagi usaha-usaha pertanian.

Dengan pola sumber nafkah semacam ini NTT memiliki tiga penyangga ketersediaan pangan.⁵ Penyangga pertama adalah usaha tani ladang (jagung, ketela pohon dan kacang-kacangan). Produksi usaha tani ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bila penyangga pertama runtuh (misalnya karena paceklik) maka masih ada penyangga kedua yaitu ternak besar (terutama babi, sapi, kerbau dan kuda). Di sini masyarakat masih mampu menjual ternaknya untuk memperoleh kebutuhan pangan. Bila penyangga kedua ini pun runtuh masyarakat masih memiliki penyangga ketiga, yaitu tanaman pangan yang tersedia di hutan (non budidaya – liar) seperti ubi hutan, talas liar, sagu dan lain-lain.

Pendapatan dan Pengeluaran Per Kapita Rendah

Propinsi NTT

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 9 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2004, standar hidup layak dapat diukur dengan indikator pendapatan per kapita riil masyarakat. Pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi di NTT.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 9 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2004, standar hidup layak dapat diukur dengan indikator pendapatan per kapita riil masyarakat. Pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi di NTT.

Pendapatan per kapita penduduk NTT berdasarkan harga konstan yang berlaku pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.811.696 per tahun atau Rp 150.975 per bulan.⁶ Jika menggunakan nilai kurs \$US 1 sama dengan Rp 9000-an (rata-rata nilai kurs pada tahun 2001), maka pendapatan per kapita penduduk NTT pada tahun 2001 atas dasar harga yang berlaku setara dengan \$US 200-an.⁷

Sebagai perbandingan, berdasarkan studi dari Laporan Pembangunan Manusia Global tahun 2002 terhadap 173 negara di dunia, diketahui bahwa kinerja pendapatan per kapita tertinggi adalah negara Luxembourg yaitu sekitar \$US 50.000 dan terendah adalah negara Sierra Leone yaitu \$US 490. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa pendapatan per kapita penduduk NTT berkisar antara \$US 200 - \$US 400, lebih rendah daripada pendapatan per kapita penduduk negara termiskin di dunia (Sierra Leone) yang sebesar \$US 490.

Kinerja pengeluaran per kapita penduduk rata-rata dapat juga digunakan sebagai variabel pengganti dalam mengkaji kinerja pendapatan ekonomi penduduk dan distribusi pendapatan penduduk. Pengeluaran per kapita penduduk NTT pada tahun 2001 atas dasar harga yang berlaku adalah sebesar Rp 1.125.240 per tahun atau Rp 93.770 per bulan dengan rincian: penduduk perkotaan adalah sebesar Rp 1.728.408 per tahun atau Rp 144.034 per bulan sedangkan penduduk pedesaan sebesar Rp 1.015.380 per tahun atau Rp 84.615 per bulan. Hal ini berarti pengeluaran per kapita per tahun penduduk perkotaan lebih tinggi sekitar Rp 713.028 (70,22%) dari penduduk pedesaan di NTT.

Pada tahun 2001 atas dasar harga yang berlaku terdapat sekitar 90,15% penduduk NTT (3.493.298 orang) yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita kurang dari Rp 150.000 per bulan atau kurang dari Rp 5.000 per hari. Kelompok penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita kurang dari Rp 150.000 per bulan atau kurang dari Rp 5.000 per hari ini terbanyak berada di daerah pedesaan NTT yaitu sebanyak 3.104.959 orang (94,72%), sedangkan yang berada di daerah perkotaan NTT adalah sebanyak 388.339 orang (65,04%).⁸

Di sini dapat dilihat tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di NTT, terutama di daerah pedesaan NTT di mana mayoritas penduduknya (94,72% dari total penduduk pedesaan) hanya memiliki tingkat pengeluaran per kapita kurang dari Rp 5.000 per hari. Berdasarkan studi ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pemerataan kemiskinan di NTT yang ditunjukkan melalui rendahnya daya beli yang diukur dari rendahnya tingkat pengeluaran per kapita dari mayoritas penduduknya.

Kabupaten Sikka

Realitas perekonomian masyarakat Kabupaten Sikka dapat ditunjukkan dengan fakta kinerja pendapatan per kapitanya antara tahun 2000-2005. Pendapatan per kapita Kabupaten Sikka yang pada tahun 2000 senilai Rp.2.030.692 mengalami kenaikan pada tahun berikutnya (2001) menjadi Rp. 2.220.671 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 189. 979. Pendapatan per Kapita pada tahun 2002 senilai Rp.2.444.403 dan Rp. 2.692.798 pada tahun 2003. Pendapatan per kapita pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 2.970.100 atau naik sebesar Rp. 525.697 dari tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita pada tahun 2005 adalah senilai Rp. 3.222.660. atau naik sebesar Rp. 252.560 dari tahun sebelumnya.

Walaupun angka pendapatan per kapita Kabupaten Sikka antara tahun 2000 dan 2005 mengalami kenaikan ternyata indeks pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Pada tahun 2004 misalnya, tercatat indeks pendapatan senilai 4,57. Namun, pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 3,54. Hal ini berarti pada tahun-tahun itu stabilitas ekonomi Kabupaten Sikka tidak cukup memadai.

Indikasi lain yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kemampuan dan ketahanan ekonomi penduduk adalah dengan mengukur daya beli masyarakat. Pada tahun 2004 daya beli masyarakat

Kabupaten Sikka adalah Rp.130.967 per bulan atau sama dengan Rp. 4.365 per hari. Daya beli masyarakat pada tahun 2005 adalah senilai Rp.133.173 per bulan atau sama dengan Rp.4.439 per hari. Pada tahun 2005, daya beli masyarakat hanya naik Rp.2.206 per bulan dari tahun sebelumnya. Dari fakta di atas dapat dihitung daya beli masyarakat per tahun pada tahun 2004 adalah senilai Rp. 1.571.604 sedangkan pada tahun 2005 senilai Rp. 1.598.076 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.472 dari tahun sebelumnya.⁹

Rendahnya daya beli masyarakat, yang sebagian besar sebarannya berada di daerah-daerah pedesaan menjadi salah satu indikator kemiskinan. Di tengah realitas perekonomian macam ini, budaya pesta (dan pesta-pesta budaya/adat) dipraktikkan.

BUDAYA PESTA DI KABUPATEN SIKKA

Kekhasan Pesta di Kabupaten Sikka

Sebagaimana di NTT, pesta yang terjadi di Sikka umumnya dilatarbelakangi oleh dua institusi yaitu institusi religius (dalam hal ini agama) dan institusi adat. Kenyataannya, di dalam sebuah pesta terjadi pembauran antara yang religius dan yang kultural. Misalnya, dalam sebuah pesta komuni pertama yang sejatinya lebih bercorak religius, unsur-unsur adat juga dapat saja dilibatkan. Hal ini memungkinkan panjangnya daftar pesta yang dapat terjadi selama setahun. Pesta komuni pertama dan pernikahan adalah dua di antaranya yang dapat digolongkan sebagai acara rutin karena dalam setahun rata-rata ada anggota masyarakat yang menerima komuni pertama atau menikah. Kalaupun tidak, biasanya setiap keluarga terlibat dan atau dilibatkan dalam satu pesta tertentu.

Dilihat dari tingkat keseringan berpesta dalam setahun dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka mempunyai tradisi berpesta yang khas. Beberapa kekhasan pelaksanaan pesta-pesta di kalangan masyarakat Kabupaten Sikka seperti jangka waktu persiapan menjelang pesta (3-7 hari), pesta yang umumnya berlangsung sepanjang hari (biasanya tertulis dalam undangan) dan acara pembubaran keluarga setelah pesta usai. Budaya seperti ini dapat bertahan tentu karena berbagai alasan dan motif yang menyertai setiap penyelenggaraan pesta.

Sebab-Sebab Pesta

Pesta, sebagaimana yang umumnya dipahami mempunyai nilai sosio-kultural di samping memuat nilai-nilai spiritual. Pesta pada umumnya dianggap sebagai momen pertemuan keluarga, kesempatan bersilaturahmi dan secara religius adalah se bentuk ungkapan syukur dari segenap anggota keluarga yang menyelenggarakan perhelatan. Pesta mengandung tiga motivasi dasar yaitu motivasi religius, motivasi sosio-kultural dan motivasi ekonomi.

Inti sebuah pesta yang biasanya terjadi dalam masyarakat menurut Wilhelm Djulei Conterius, putra Sikka adalah satu perayaan kebersamaan dan bentuk nyata ungkapan syukur. Demikian ungkapanya:

Dalam sebuah acara pernikahan, misalnya, pesta adalah satu pernyataan terima kasih kepada Tuhan karena pertemuan kedua mempelai sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan. Pertemuan ini melibatkan dua keluarga besar yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Mereka tentu tidak dipertemukan secara kebetulan. Sebagai ungkapan syukur ini, orang biasanya menyelenggarakan pesta.¹⁰

Pesta sebenarnya adalah satu fenomena spiritual dan biasanya sangat bernuansa religius. Selain mengandung motivasi religius, pesta juga didorong oleh nilai sosio-kultural. Pesta adalah saat di mana anggota-anggota keluarga yang jauh bertemu. Di kalangan masyarakat (pedesaan) di Kabupaten Sikka pada umumnya setelah menikah seorang perempuan meninggalkan keluarganya dan tinggal di lingkungan keluarga laki-laki atau menetap di tempat baru yang jauh dari keluarga besar suku dan kerabat. Dengan begitu, pesta adalah satu kesempatan yang istimewa bagi segenap keluarga yang sudah lama berpisah untuk bertemu. Suryanto mengakui dimensi sosio-kultural ini selain menekankan pula bahwa pesta dapat menjadi momen rekonsiliasi, sebagaimana yang diturkannya:

Pesta itu penting karena pada umumnya pertemuan itu menjadi kesempatan bagi keluarga-keluarga yang bertikai untuk berdamai kembali dan mempererat tali persaudaraan yang mungkin sempat retak di masa-masa yang lalu.¹¹

Dalam banyak kasus adat perkawinan, belis tidak dilunasi oleh pihak keluarga laki-laki pada saat acara peminangan. Oleh kesepakatan keluarga kedua belah pihak pembayaran belis biasanya diangsur. Namun, angsuran belis ini tidak dapat diserahkan begitu saja. Penyerahan belis mesti melalui suatu acara resmi juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Mentiana:

Di daerah sini, kesempatan pesta sambut baru atau pesta apapun yang dibuat oleh pihak keluarga perempuan menjadi satu kesempatan bagi pihak keluarga laki-laki untuk mengangsur belisnya. Jadi pesta sambut baru itu tidak hanya memuat satu pesan seperti syukur misalnya, tetapi juga urusan adat lainnya yang belum beres. Adat kami, kalau orang sudah melunasi belis maka perempuan resmi menjadi milik keluarga laki-laki dan pihak laki-laki 'tidak wajib' menghadiri setiap acara yang dibuat oleh keluarga perempuan. Bahkan, termasuk kalau ada anggota keluarga perempuan yang meninggal. Tetapi kalau belum melunasi belis, laki-laki masih sangat terikat pada keluarga perempuan.¹²

Dengan begitu, pesta, apapun bentuknya kadang-kadang bisa saja terjadi sebagai sarana melaluinya urusan-urusan adat lainnya dilaksanakan. Pesta komuni, misalnya, tidak melulu berupa perayaan syukur komuni bersangkutan tetapi dapat menjadi momen untuk melaksanakan urusan-urusan adat lainnya. Kemungkinan adanya motivasi seperti ini menjadi peluang terulangnya pesta.

Sumber Dana Pesta

Di Kabupaten Sikka dan NTT pada umumnya pesta diselenggarakan sebagai satu perayaan bersama. Pada kesempatan pesta biasanya harta benda disumbangkan kepada tuan pesta.¹³ Para tetangga dan kerabat biasanya merasa berkewajiban untuk membantu keluarga yang sedang berhajat. Dengan demikian, biaya untuk menyelenggarakan satu pesta biasanya tidak ditanggung sendiri. Positifnya, semangat kekeluargaan dan gotong-royong yang masih sangat tinggi sering diupayakan sebagai jalan keluar untuk mengatasi banyak kekurangan.

Namun, fakta ini secara ekonomis sebenarnya mengindikasikan ketidaksiapan finansial untuk menyelenggarakan sebuah pesta secara mandiri. Menariknya, berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat

sebenarnya menyadari keterpurukan ekonominya. Mentiana mengakui hal ini dalam komentarnya berikut:

Kenyataannya masyarakat kita miskin. Sebagai warga Kabupaten Sikka, saya melihat bahwa perilaku berpesta di kalangan masyarakat tidak cukup wajar. Tidak terlalu realistis dengan keadaan karena banyak kali terjadi bahwa orang berani berhutang untuk menyelenggarakan satu pesta. Ujung-ujungnya, orang bekerja lebih banyak untuk tutup hutang bukan untuk kebutuhan pokok lain.¹⁴

Keterangan ini lalu meninggalkan satu catatan penting. Penilaian bahwa pesta di kalangan masyarakat terkesan dipaksakan mesti direfleksikan dalam seluruh kerangka analisis ini dengan paling kurang memperhatikan dua pertimbangan. *Pertama*, kesadaran akan ketidakmampuan ekonominya sendiri menuntut anggota masyarakat untuk mencari sokongan dana dari luar ketika menyelenggarakan sebuah pesta. Kebanyakan sokongan datang dari kerabat atau tetangga. Itu berarti semangat gotong-royong di kalangan masyarakat kita masih sangat tinggi. Namun, *kedua*, potensi ini sekaligus mengandung tantangan. Potensinya, tanggungan terbagi. Tantangannya, rantai investasi modal dan jasa sulit diputuskan karena apa yang sekarang diinvestasikan akan menjadi “tagihan” di kemudian hari dengan beban atau biaya yang cenderung lebih tinggi.

Memang mesti diakui bahwa oleh kemajuan zaman dan tingkat pendidikan yang makin memadai orang juga semakin sadar dan berkompeten untuk mempersiapkan sebuah pesta yang sehat secara ekonomis. Artinya, dari hari ke hari semakin nampak perubahan pola tingkah laku masyarakat dalam mempersiapkan sebuah pesta. Namun, umumnya ini terjadi di lingkungan perkotaan sedangkan di desa-desa – di mana sebaran mayoritas penduduk NTT dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk rendah – masih sering terulang pola yang lama. Tentang ini Wilhelm Djulei berkomentar:

Sejauh pengamatan saya, jarang sekali terjadi bahwa pesta menyebabkan keluarga yang bersangkutan jatuh pailit. Dalam beberapa kasus hal ini mungkin terjadi tetapi oleh kemajuan tingkat pendidikan orang mulai sadar. Dalam pesta pernikahan misalnya, kedua keluarga sama-sama mempersiapkan dana untuk itu dan saya

yakin untuk pesta orang selalu mempersiapkannya secara baik jauh-jauh hari sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa ada dua sumber dana untuk berpesta yaitu dari keluarga bersangkutan yang menyelenggarakan pesta dan dari sumbangan dana para kerabat dan tetangga. Ditambah lagi dengan pola penyebaran penduduk dan pemukiman pedesaan di NTT dan Kabupaten Sikka pada khususnya yang masih sangat kuat dilatarbelakangi oleh kesamaan kekerabatan ataupun suku memungkinkan pesta menjadi satu perhelatan yang berbasis komunal dengan biayanya menjadi beban bersama.

ANALISIS SOSIO-EKONOMI TERHADAP BUDAYA PESTA

Pesta: Bahaya Pemiskinan

Seorang pengamat sosial, Joan Kealiinhomoku yang berasal dari Samoa Island, meyakini bahwa *dance is culture and culture is dance*.¹⁶ Dengan proposisi ini kita lalu dapat mengatakan, semua pesta adalah budaya dan budaya (suatu masyarakat) dapat dikenal dalam dan melalui pesta-pesta. Di dalam sebuah pesta seluruh konfigurasi sosial menyuguhkan aspek-aspek kehidupan secara holistik seperti kekerabatan, kebiasaan dan adat-istiadat, cara pandang, doa dan juga kesejahteraan hidup.

Cara melihat dan menilai budaya seperti ini mengantar kita pada kesimpulan bahwa budaya yang di dalamnya manusia melibatkan diri sebagai pelakunya dapat digunakan sebagai medium untuk mengevaluasi perilaku masyarakat. Karena budaya, selain dikendalikan dan dibentuk oleh masyarakat juga dapat mengendalikan dan membentuk (perilaku) individu atau masyarakat tertentu.¹⁷

Pada kesempatan ini coba kita kaji budaya berpesta masyarakat Sikka sebagai cerminan budaya pesta masyarakat pedesaan di NTT. Secara ekonomis, penyelenggaraan sebuah pesta menuntut biaya yang tidak sedikit. Gotong-royong adalah kebiasaan baik dalam masyarakat sebagai jalan keluar menjawab berbagai kendala finansial. Risiko laten kegotongroyongan seperti ini adalah bahwa rantai investasi modal dan jasa sulit diputuskan. Berikut ini penilaian Mentiana:

Kebiasaan berpesta di sini sudah menjadi semacam tradisi. Di dalam masyarakat kami, setiap keluarga sepertinya tinggal menanti gilirannya untuk berpesta. Dan, dalam setiap pesta yang dibuat tetangga, misalnya, semua tetangga lain pasti punya rasa simpati atau tepatnya 'berutang budi' untuk membalas kebaikan tuan pesta yang juga telah berbuat baik atau menyumbangkan sesuatu di masa lalu. Sumbangan untuk memperlancar pesta itu dapat berupa bantuan konkret dengan sokongan dana atau menyumbangkan tenaga.¹⁸

Sejauh mata rantai investasi itu masih bergulir dalam satu relasi timbal balik yang proporsional keadaan akan stabil. Namun dengan demikian, kenaikan harga barang di pasar sedikit saja pada satu waktu tertentu akan menjadi risiko yang mau tidak mau mesti ditanggung juga oleh orang lain yang tidak menyelenggarakan pesta. Mentiana mengungkapkan kemungkinan lain dari model investasi seperti ini:

Karena pesta itu semacam arisan bergilir, di sana ada saling tuntutan untuk balas budi. Kalau pada kesempatan pesta yang lalu si A menyumbang pada Si B maka sekarang ketika si A menyelenggarakan pesta si B wajib (merasa wajib) untuk menyumbang pula. Nah, kalau si B kebetulan tidak punya cukup uang saat itu, bisa saja terjadi salah paham dan cekcok.¹⁹

Risiko konflik sebagai satu kemungkinan, dibayang-bayangi juga oleh persoalan ekonomi sebagai buntut semua diskursus di seputar pesta. Untuk menyelenggarakan suatu pesta, keluarga yang berpesta harus menyiapkan dana taktis untuk menjaga kemungkinan membengkaknya anggaran pesta. Di Sikka, ada kebiasaan berpesta yang unik. Tiga hari sebelum pesta, kemah untuk berpesta dan segala perlengkapan yang berhubungan dengan pesta sudah mulai dipersiapkan. Pada kesempatan itu keluarga kedua belah pihak berkumpul untuk membicarakan banyak hal berkaitan dengan penyelenggaraan pesta. Kenyataan ini sebagaimana diungkapkan Martha Lodan:

Dalam pesta komuni pertama misalnya, tiga hari sebelum pesta, keluarga besar dari pihak laki-laki maupun perempuan sudah berkumpul untuk membicarakan anggaran pesta. Malah dalam pesta-pesta yang direncanakan lebih besar lagi seperti pesta pernikahan,

persiapan seperti ini sudah dibuat paling kurang seminggu sebelumnya. Memang dalam pertemuan ini sering dikeluarkan banyak biaya untuk makan-minum tetapi itu sudah menjadi budaya orang di sini. Bukan itu saja, sesudah pesta biasanya keluarga masih bertahan beberapa hari lagi untuk membagi hasil pesta.²⁰

Dengan melihat perilaku sosial seperti ini kita dapat meninjau kembali tujuan konsumsi yang dipenuhi oleh sistem produksi masyarakat kita. Ada tiga jenis kebutuhan ekonomi yang perlu dibedakan yaitu: (1) kebutuhan akan barang-barang mewah; (2) kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan penting, tetapi tidak terlalu penting untuk kelangsungan kehidupan; (3) kebutuhan dasar untuk hidup.

Dari pengelompokan dasar ini kita dapat mengetahui prinsip-prinsip yang mengatur segala bentuk sistem ekonomi, khususnya sistem ekonomi yang seperti kita miliki sekarang dan yang kita jalankan dalam sebuah dunia di mana kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak terhitung banyaknya terus tidak terpuaskan. Prinsip-prinsip yang mengatur ini bahwa, setidaknya, kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup (3) harus didahulukan daripada kebutuhan akan barang-barang mewah (1). Lebih tepatnya, kita bisa mengatakan bahwa kebutuhan akan barang-barang mewah cenderung menjadikan kita tidak ekonomis, ketika dalam memuaskan keinginan akan kemewahan tersebut kita menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar orang lain.²¹

Pada prinsipnya secara ekonomis kebutuhan primer mesti didahulukan menyusul kebutuhan sekunder dan tersier. Pada kasus-kasus pesta yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita terlihat satu gejala loncatan pemenuhan kebutuhan. Kalau pesta dikelompokkan sebagai kebutuhan tingkat ketiga (tersier) yang pemenuhannya mesti menunggu (baca: mengandaikan) pemenuhan kedua dan kebutuhan pertama maka loncatan seperti ini mengundang perhatian kita untuk mempersoalkan budaya pesta dalam masyarakat kita. Karena, dengan demikian ada bahaya orang semakin dimiskinkan oleh pesta.

Berdasarkan asumsi ini kita bisa mengevaluasi dana penyelenggaraan pesta dalam masyarakat kita. Sebagai misal, Koltidius Sawa, warga Wairpelit yang penulis wawancarai mengaku, ketika memestakan anaknya yang berkomuni pertama pada tahun 2001 ia mengeluarkan biaya kurang lebih senilai Rp. 3,5 juta. Pada tahun 2001 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sikka adalah senilai Rp. 2.220.671.

Artinya, ketika menyelenggarakan pesta itu Sawa mesti menanggung beban atau mengalami defisit anggaran sebesar Rp.1,2 juta lebih.²²

Berdasarkan kebiasaan masyarakat, beban anggaran ini secara tidak langsung ditanggung kepada para tetangga atau kerabat. Fakta yang ditunjukkan oleh evaluasi terhadap anggaran pesta Koltidius Sawa dapat menjadi cerminan kemampuan masyarakat yang menyelenggarakan sebuah pesta. Di sinilah kemungkinan terjadinya apa yang disebut kemiskinan sekunder.²³

Perubahan Pola Nafkah dan Beban Pesta

Pada umumnya, ada tiga penyangga nafkah yang menjadi sandaran kebanyakan masyarakat Sikka dan NTT pada umumnya yaitu usaha tani ladang (jagung, ketela pohon dan kacang-kacangan) sebagai penyangga pertama. Penyangga kedua yaitu ternak (terutama sapi, kerbau, kuda dan babi) dan peyangga ketiga, yaitu tanaman pangan yang tersedia di hutan.²⁴ Apabila penyangga pertama runtuh karena kelaparan misalnya, masyarakat masih punya penyangga kedua. Penyangga kedua runtuh masih ada penyangga ketiga. Pola ini secara tradisional sangat bertahan dan dinilai dapat beradaptasi dengan iklim NTT yang kering.

Ketika pesta berkecambah sebagai satu budaya komunal yang cukup konsumtif maka akan berakibat secara langsung pada pola ketahanan pangan masyarakat. Masyarakat pada umumnya menyandarkan nafkahnya dari hasil ladang atau kebun. Namun, akibat curah hujan yang rendah (banyaknya hari hujan di Kabupaten Sikka dalam setahun 98 hari atau rata-rata 3 bulan per tahun)²⁵. Akibatnya, masyarakat rata-rata sudah mengalami kekurangan pangan pada enam bulan kedua. Berdasarkan pola penyangga nafkah maka ketika mengalami kekurangan pangan masyarakat dapat menyandarkan nafkahnya pada ternak-ternak mereka sebagai penyangga kedua. Namun, ternak sebagai penyangga kedua rupanya tidak banyak diharapkan karena selain pemeliharaan ternak tidak berorientasi bisnis,

pada umumnya kepemilikan ternak disumbangkan untuk pesta. Karena penyangga kedua ini rapuh maka tidak heran kebanyakan masyarakat cenderung berlari ke hutan untuk mendapatkan pasokan makanan dengan mengonsumsi pangan non-pertanian seperti talas, *ondo*, putak dan lain-lain sebagai pengganti bahan makanan pokok yang diperoleh dari kebun, ladang atau sawah.

Keadaan akan lain ketika krisis lahan dimulai dari hutan sebagai penyangga terakhir yang menyediakan pasokan pangan non budidaya bagi masyarakat. Ini yang rupanya sedang menimpa kita. Budaya bakar tidak diikuti dengan budaya tanam. Setiap upaya penghijauan selalu dibayang-bayangi tradisi penghitaman. Di sini, keseimbangan alam dikacaukan karena pengrusakan. Implikasinya, hutan, tempat sandaran terakhir masyarakat tidak lagi menyediakan pangan yang memadai ketika paceklik menimpa. Mesti dibutuhkan tengah baru berupa penyangga keempat yang dapat menjadi malaikat penolong di setiap krisis.

Pemerintah Daerah, terutama di masa kepemimpinan Gubernur Ben Mboy sebenarnya telah menyadari pentingnya ketiga penyangga tersebut. Saat itu Gubernur memperkenalkan industri kerajinan rakyat sebagai penyangga keempat. Dengan harapan, bila terjadi paceklik, penduduk NTT masih bisa bersandar pada hasil kerajinannya yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.²⁶

Sebuah contoh aktual. Di kalangan masyarakat, fenomena ojek muncul sebagai penyangga baru (apakah ini penyangga keempat?) yang dalam kerangka analisis di atas dapat dikaitkan dengan runtuhnya ketiga penyangga nafkah alamiah. Pilihan untuk mengojek bisa menjadi favorit bukan saja karena lemahnya SDM untuk mengolah dan memberdayakan lahan pertanian dan peternakan sebagai sandaran utama penghasilan tetapi perlu, mempertimbangkan kenyataan alamiah lain seperti rendahnya curah hujan bisa menjadi pertimbangan masyarakat (terutama kaum muda) untuk menjadi tukang ojek dengan penghasilan harian yang lebih nyata. Jadi, rendahnya penghasilan yang diperoleh dari

pengelolaan lahan pertanian dan peternakan domestik memungkinkan masyarakat mencari satu penyangga baru yang diharapkan dapat menggantikan posisi penyangga kedua. Untuk sementara, ojek misalnya, menjadi penyangga andalan karena tidak banyak menuntut prasyarat yang rumit seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, keahlian dan lain-lain.

MENCARI TENGAH BARU: SEBUAH REKOMENDASI

Keadaan sosial, budaya dan ekonomi tidaklah statis tetapi merupakan kondisi yang dinamis di mana perubahan salah satunya dapat menimbulkan perubahan yang lain. Dengan demikian, setiap aktivitas penanggulangan kemiskinan diduga, sedikit banyak, akan merubah kondisi setempat. Masyarakat desa atau kelurahan yang berdaya adalah masyarakat yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungannya dan mampu memanfaatkan kondisi lingkungan yang baru tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Keberdayaan merupakan hasil dari proses belajar yang partisipatif dan kontinyu. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, tidak ada keberdayaan yang diperoleh tanpa melibatkan secara aktif orang yang akan diberdayakan. *Kedua*, suatu masyarakat yang berdaya menghadapi kondisi lingkungan tertentu dapat menjadi tidak berdaya bila tidak siap menghadapi perubahan lingkungannya baik lingkungan sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan fisiknya. Oleh sebab itu, keberdayaan harus pula dipahami sebagai bentuk ketahanan menghadapi perubahan lingkungan dan kemampuan memanfaatkan lingkungan yang baru tersebut untuk kesejahteraan hidupnya sendiri. Upaya pemberdayaan penduduk miskin yang berbasis komunitas menuntut adanya perubahan cara berpikir dan cara bertindak masyarakat itu sendiri. Di sini masyarakat mesti mempunyai kesadaran akan kemampuan-kemampuan dan kelemahan-kelemahannya sendiri (termasuk budaya yang memiskinkan).

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Upaya meningkatkan pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan memperkuat usaha pertanian ladang, peternakan dan konservasi alam yang merupakan penyangga ketahanan pangan masyarakat kita sambil menumbuhkembangkan sektor-sektor non pertanian yang dikenal dan menjadi andalan keluarga miskin seperti kerajinan rakyat dan perdagangan kecil yang kemudian diharapkan dapat menjadi penyangga pangan keempat setelah usaha tani-ladang, usaha peternakan dan stok pangan non budidaya di hutan.

Masyarakat sendiri menyadari bahwa dalam berpesta terjadi pemborosan. Kenyataan di lapangan, masih terdapat banyak daerah yang tingkat produksi pertaniannya tidak dapat mensuplai cukup bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan selama setahun. Dengan demikian mesti ditegaskan bahwa budaya pesta (dengan segala kecenderungan negatifnya) turut “mencuri” sejumlah hasil yang diperoleh dari produksi pertanian karena produksi pertanian yang memang kurang (tidak) mencukupi untuk setahun dibebani lagi dengan sejumlah biaya pesta yang sebenarnya tidak mesti ditanggung oleh sebuah keluarga.

Berpesta pada prinsipnya tidak buruk dalam dirinya sendiri tetapi perilaku berpesta mesti dievaluasi agar tidak menambah beban ekonomi bagi rumah tangga. Pesta mestinya dapat diperhitungkan secara matang sambil meengevaluasi keadaan keuangan ekonomi keluarga. Melihat kenyataan ekonomi rata-rata penduduk di Sikka dan NTT pada umumnya yang masih tergolong miskin maka pesta, mesti ditinjau kembali urgensinya.

Tinjauan terhadap urgensi nilai sebuah pesta dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap kemampuan keuangan untuk menyelenggarakan pesta. Dengan demikian, dana untuk berpesta dapat dialirkan untuk intensifikasi lahan dan juga investasi modal melalui tabungan. Lebih lagi, budaya pesta tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang melulu negatif sejauh semangat kekeluargaan dan gotong-royong dapat menjadi

peluang untuk menyokong dana pendidikan generasi muda kita. Pesta-pesta kita akhirnya mesti memperhitungkan investasi untuk pendidikan. Melalui jalan tengah ini, kita mengharapkan suatu masyarakat yang siaga bencana.

Jadi pesta, selain mempunyai efek sosio-kultural juga mempunyai efek ekonomis. Dalam tradisi masyarakat NTT aspek sosio-kultural berpesta ditempatkan sebagai yang pertama dan terutama. Karena tradisi gotong-royong yang masih kental, aspek ekonomis seringkali “pemali” untuk dibicarakan. Orang malu kalau pesta batal. Lebih baik mengutang daripada dianggap tidak mampu menyelenggarakan sebuah pesta. Karena aspek sosio-kulturalnya dinomorsatukan bahkan menjadi tujuan pesta itu sendiri, ekonomi terabaikan.

Kesadaran berpesta serentak menuntut kemampuan dan kapasitas untuk menanggung beban. Dalam masyarakat kita biaya pesta sering dibebankan pada komunitas yang lebih luas. Bila ini terjadi maka sebenarnya secara ekonomis beban (biaya) pesta dikurangi tetapi rantai harapan untuk menanggung beban pada orang lain dalam bentuk investasi modal dan jasa sangat kuat. Di sini, pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat dapat mengubah perilakunya dalam berpesta.

Memang, persoalan pemberdayaan ekonomi adalah persoalan yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi kehidupan yang menuntut analisis dan pertimbangan yang komprehensif. Persoalan pemiskinan nyatanya tidak bersumber dari pesta saja tetapi kiat-kiat pemberdayaan masyarakat selalu mengandaikan kekuatan otonom yang secara potensial sudah ada di dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi akan efektif bila masyarakat belajar menjadi penyelenggara pesta yang arif dan bijaksana. Ini berhubungan dengan taksasi dana, dan orientasi ke masa depan yang realisasinya berupa intensifikasi lahan pertanian dan investasi modal melalui tabungan. Karena pesta, tidak saja berhubungan dengan “tata ruang” tempat sebuah pesta digelar dan “tata juang” bagaimana upaya menyelenggarakan sebuah pesta tetapi juga menyangkut “tata uang”, bagaimana uang mengendalikan manusia dan

sebaliknya bagaimana manusia mengatur keuangannya. Kalkulasi-kalkulasi seperti ini adalah upaya-upaya mencari tengah baru untuk mengimbangi harmoni alam yang telah terganggu. Supaya, ketika paceklik tiba kita masih mempunyai simpanan dan cadangan.

Catatan Akhir

¹Budaya pesta dalam konteks pembahasan ini merangkum juga praktik-praktik pesta budaya (adat).

²Bdk. Sri Hartati Samhadi, Tinjauan Ekonomi, *Kompas*, 23 Desember 2006, hlm. 33. kol. 6.

³Dalam budaya nafkah agro-pastoral, umumnya masyarakat menyandarkan sumber nafkahnya pada aktivitas ladang atau kebun dan beternak. Salah satu ciri budaya nafkah di NTT adalah aktivitas pertanian ladang atau kebun umumnya tidak berorientasi pada pasar melainkan berorientasi untuk pemenuhan konsumsi keluarga sehari-hari. Bdk. Adiyoga dan Erni Herawati dalam http://www.ekonomirakyat.org/edisi_12/artikel-3.htm, diakses: Jumat, 7 September 2007.

⁴BPS Propinsi NTT, 2001. Bdk. Viator Parera, "Pertanian Lahan Kering NTT dan Agroekologi" dalam *Jurnal Ledalero* Vol. 3, No. 2, Desember 2004, hlm. 39-42.

⁵Adiyoga, *Loc. Cit.*

⁶NTT dalam Angka Tahun 2001.

⁷Pada tahun 2006 pendapatan per kapita NTT naik menjadi Rp. 3.618.315 atau setara dengan \$US 400-an (dengan kurs \$US 1: Rp. 9000). Bdk. *Pos Kupang*, 3 Oktober 2007, hlm. 1.

⁸Vincent Gaspersz dan Esthon Foenay, "Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi NTT" dalam http://www.ekonomirakyat.org.edisi_20/artikel_10.htm. Diakses pada Kamis, 30 Agustus 2007.

⁹Bappeda Kabupaten Sikka tahun 2006.

¹⁰Wilhelm Djulei Conterius, Wawancara, *Ledalero*, 10 September 2007.

¹¹Yohanes Suryanto, Wawancara, *Ledalero*, 10 September 2007.

¹²Agnesi Mentiana, Wawancara, *Misir*, 10 September 2007.

¹³S. Hartati Samhadi, *Op. Cit.*

¹⁴Agnesi Mentiana, Wawancara, *Misir*, 10 September 2007.

¹⁵Wilhelm Djulei Conterius, Wawancara, *Ledalero*, 10 September 2007.

¹⁶Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 7-9.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 185-186.

¹⁸ Agnesi Mentiana, Wawancara, Misir, 10 September 2007.

¹⁹ Agnesi Mentiana, Wawancara, Ledalero, 10 September 2007.

²⁰ Marta Lodan, Wawancara, Ledalero, 13 September 2007.

²¹ Bob Goudzwaard dan Harry de Lange, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran* penterj. Ribut Basuki dkk (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 97-98.

²² Koltidius Sawa, Wawancara, Wairpelit, 13 September 2007.

²³ Kemiskinan sekunder diartikan sebagai penderitaan dan kemelaratan ekonomi yang disebabkan oleh pengeluaran uang secara tidak arif atau tidak bertanggung jawab oleh istri atau suami. Bdk. Karl Heinz Peschke, *Etika Kristiani IV: Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*, penterj. Alex Armanjaya dkk. (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 35.

²⁴ Bdk. Adiyoga dan Erni Herawati, *Op. Cit.*

²⁵ Badan Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (Ed.), *NTT dalam Angka 2006* (Kupang: BPS NTT, 2005), hlm. 33.